

## ABSTRAKSI

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik untuk memberantas terjadinya *fraud*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *external pressure*, *ineffective monitoring*, dan *audit report* terhadap kemungkinan *fraud* di sektor publik. Penelitian ini menggunakan universal *sampling* sebanyak 119 pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) se-Pulau Jawa. Pengumpulan data penelitian dari publikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan mendapatkan opini BPK untuk periode 2016-2018.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. *External pressure* dan *ineffective monitoring* diukur menggunakan temuan kasus ketidakpatuhan pada perundang-undangan dan kelemahan pengendalian internal dalam LHP BPK, *audit report* diukur menggunakan opini yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, dan *fraud* diprosikan menggunakan skala kategorial (*dummy*) atas temuan kasus *fraud* berdasarkan data inkracht dari KPK.

Berdasarkan hasil uji regresi logistik yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *external pressure* dan *ineffective monitoring* tidak memberikan pengaruh pada terjadinya *fraud*, sedangkan *audit report* menunjukkan pengaruh negatif terhadap terjadinya *fraud* laporan keuangan di pemerintah daerah yang menunjukkan tidak adanya praktik kecurangan. Secara simultan, *external pressure*, *ineffective monitoring*, dan *audit report* tidak mempengaruhi terjadinya *fraud* laporan keuangan di pemerintah daerah.

Kata Kunci: *External pressure, Ineffective Monitoring, Audit Report, Fraud Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*